

REFLEKSI POLITIK ISLAM KONTEMPORER DI NEGARA DUNIA PERTAMA

Muhammad Syauqi Almalik

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

E-mail: syauqialmalik16@gmail.com

ABSTRAK

Islam dan modernitas telah saling bertemu begitu lama sejak masa kolonialisme hingga situasi politik global kontemporer pasca 11 September 2001. Perkembangan Islam politik tidak asing dengan konteks hubungan internasional. Model kebangkitan Islam kontemporer harus mempertimbangkan perkembangan interkoneksi global di satu sisi, dan eskalasi sentimen anti-Islam dan anti-imigran di Barat di sisi lain. Dalam konteks penelitian ini merujuk pada Islam di Negara Dunia Pertama yang biasa dikenal dengan Negara pemenang Perang Dunia II atau Negara berpaham Kapitalisme. Penelitian ini mempertanyakan beberapa hal terkait gambaran Politik Islam di Negara dunia Pertama yaitu : Bagaimana konsep Negara dunia Pertama? Bagaimana Islam menghadapi isu radikalisme? Bagaimana Islam di Eropa? Apa Strategi Politik Islam dalam Pemikiran Kontemporer? Bagaimana Politik Islam di Eropa? Apa Politik Islam bisa menghadapi arus Globalisasi?

Kata Kunci: Politik Islam, Radikalisme, Globalisasi, Kontemporer.

REFLECTION OF CONTEMPORARY ISLAMIC POLITICS IN FIRST WORLD COUNTRIES

ABSTRACT

Islam and modernity has been encountering each other for such a long time since the colonialism period to the contemporary situation of global politics in the post of September 11th 2001. The result of such encounter varies, depending upon the complexity of the changeably deteriorating situation of Muslims themselves. The development of political Islam is not alien to the context of international relation. The contemporary model of Islamic renaissance should consider the development of global interconnection in one hand, and the escalation of anti-Islam and anti-immigrant sentiments in the West on the other. In the context of this research, it refers to Islam in the First World Countries, which is commonly known as the winning countries of World War II or the countries with the concept of capitalism. This study questions several things related to the description of Islamic Politics in First World Countries, namely: What is the concept of First World Countries? How does Islam deal with the issue of radicalism? How is Islam in Europe? What is Islamic Political Strategy in Contemporary Thought? How is Islamic Politics in Europe? Can Islamic Politics face the current of Globalization?

Kata Kunci: *Islamic Political, Radicalism, Globalization, Contemporary*

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang refleksi politik Islam kontemporer di negara dunia pertama. Kehadiran Islam yang hampir mengisi setiap jengkal tanah di permukaan bumi ini telah meninggalkan kesan tersendiri bahwa salah satu agama dari agama-agama Ibrahim ini telah menjadi kekuatan global yang cukup signifikan. Bisa saja jika dikatakan bahwa Agama Islam sedang menjalankan peran globalisasinya, menembus semua lini sosial, budaya, bahasa dan politik manapun di dunia ini. Uniknyanya lagi, tidak ada invasi, ekspansi, pertikaian ataupun Clash of Civilization, sebagaimana yang pernah digambarkan sebagian pakar Barat. Islam begitu mudah beradaptasi, berbaur dan diterima oleh kalangan manapun, meskipun sesekali pada saat-saat awalnya, ada keterkejutan budaya pada daerah atau kebudayaan yang baru disinggahinya. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa persebaran dan menjamurnya Islam di Barat pada akhir-akhir ini lebih bersifat kultural yang bertepatan waktunya dengan semakin meningkatnya daya imigrasi kaum Muslim ke negeri-negeri Barat dan Eropa.

Selama Perang Dingin, Hubungan antara “Dunia Pertama” dan “Dunia Kedua” dari Negara Komunis biasanya kompetitif, ideologis dan bermusuhan. Hubungan kedua “Dunia” ini dengan Negara-negara “Dunia ketiga” yaitu Negara non blok biasanya positif dalam teori, sementara beberapa yang cukup negatif dalam praktiknya (seperti dengan praktik perang proksi/Proxy War). Hadirnya hubungan antar dunia ini tidak begitu kaku, meskipun ada perbedaan arti Negara-negara Dunia Pertama memiliki pengaruh yang lebih besar, kekayaan, informasi dan kemajuan daripada yang lain.

John L. Esposito mengakui bahwa dalam tiga dasawarsa terakhir peningkatan imigrasi Muslim berhasil mengubah peta keberagaman Muslim di Eropa dan

Amerika, hingga menjadi agama terbesar kedua atau ketiga. Hanya dalam beberapa dekade, Umat Islam telah menampakkan jati diri yang tidak kecil. Pada saat ini, masjid-masjid dan pusat-pusat kajian Islam mungkin bisa ditemukan di kota-kota dan desa-desa di Barat. Umat Islam cukup terlihat dalam banyak profesi semisal kekuatan buruh, militer, jenderal, pengacara, guru besar, pebisnis, ilmuwan dan hakim. Diakui pula oleh Esposito bahwa deretan kota-kota besar dan mayoritas Muslim kini tidak hanya meliputi Kairo, Tunisia, Damaskus, Islamabad, Kuala Lumpur dan Jakarta, akan tetapi juga terdapat di Negara Barat seperti Paris, Marseilles, London, Manchester, Bonn, Amsterdam, New York dan Detroit.

Kehadiran Islam dan Umat Islam yang bersifat global pada saat ini menuntut kita Islam di Mata Orientalisme Klasik dan Orientalisme Kontemporer untuk tidak hanya menyatakan “Islam dan Barat” akan tetapi “Islam di Barat”. Salah satu kata yang tepat untuk melukiskan rentannya persepsi Barat tentang Islam. Ada masa-masa tenang dimana Islam didefinisikan sebagai agama yang cinta damai, menghargai harkat dan martabat manusia serta mengedepankan Toleransi dan cinta persaudaraan. Namun seketika persepsi ini bisa saja terbang bak bulu dihembus angin, seiring terjadinya beberapa kasus yang mengganggu orang-orang Barat, sebutlah misalnya kasus-kasus yang menyangkut tindak terorisme.

Ketika tindak terorisme semisal tragedi WTC 11 September 2001 ataupun bom London 7 Juli 2005 melanda, seolah-olah ribuan mata dan persepsi mengarah kepada Islam. Sebagian kaum Muslim tidak jarang memperoleh intimidasi dan diskriminasi disusul aksi-aksi perusakan tempat ibadah ataupun lembaga pendidikan Islam. Fenomena di atas seolah-olah mengingatkan kembali atas apa yang pernah disampaikan oleh Edward W. Said bahwa tetap akan ditemukan kesulitan untuk memperoleh

persepsi yang berimbang tentang Islam di Dunia Barat. Karena dalam realitanya Barat masih sering menjadikan Islam sebagai sasaran empuk tuduhan dan stereotip, apakah itu ancaman, sarang terorisme dan sebagainya, kajian-kajian Baratpun mengenai Islam tidak lepas dari kesan kecurigaan dan kebencian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) tentang kaji tokoh, objek yang akan dikaji adalah Politik Islam di Negara Dunia Pertama. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menganalisis lebih mendalam tentang Politik Islam di Barat yang berkaitan dengan konsep politik Islam Kontemporer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa sumber buku primer dan hasil karya ilmiah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dunia Pertama

Konsep Dunia Pertama bermula dari Perang Dingin, yang melibatkan Negara-negara yang sejajar atau setara dengan Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini sebagian besar ekonomi pasar dan bersistem demokrasi. Setelah jatuhnya Uni Soviet, istilah “Dunia Pertama” bisa dibilang mengambil makna baru, sebagian besar menjadi identic dengan Negara-negara maju.

Setelah Perang Dunia Kedua di akhir 1940-an, dunia dibagi menjadi dua blok geopolitik yang besar, memisahkan ke dalam wilayah Komunisme dan Kapitalisme. Hal ini menyebabkan Perang Dingin, dimana Istilah Dunia Pertama sering digunakan karena relevansi politik, sosial, dan ekonomi. Istilah itu hadir pertama kali pada akhir 1940-an oleh PBB. Saat ini, istilah dunia pertama sedikit usang dan tidak memiliki

defenisi resmi, namun secara umum dianggap sebagai kapitalis, industri, kaya, Negara-negara maju yang sejajar dengan Amerika Serikat dan Britania Raya setelah Perang Dunia II.

Defenisi ini mencakup sebagian besar Negara-negara Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, dan Jepang. Dalam masyarakat Modern, Dunia Pertama dipandang sebagai Negara yang memiliki ekonomi paling maju, pengaruh terbesar, standar hidup tertinggi, dan teknologi terbesar. Setelah perang dingin, Negara-negara dari Dunia Pertama termasuk Negara-negara anggota NATO, Negara sekutu Amerika, Negara-negara netral yang dikembangkan dan industri, dan bekas koloni Inggris yang dianggap telah dikembangkan.

Sebelum memasuki ranah pembahasan, penulis ingin mengajak pembaca untuk mengeksplorasi fenomena atau gambaran dalam Islam di Barat. Refleksi tersebut tidak hanya disusun dari sisi Ke-Islaman (*Syariat*), namun poin-poin kehidupan bernegara dan keseimbangan perdamaian Negara tersimpan didalamnya. Maka tak lepas makna Politik Islam yang penulis maksudkan ialah Politik yang tidak berkutat pada Politik Praktik saja akan tetapi memasuki elemen-elemen Politik Akademis dalam teorinya. Dapat dilihat pula kurikulum tentang politik Islam bukanlah hal yang baru lahir kemarin, namun telah berkembang seiring waktu sampai masa Kontemporer tiba.

Islam Dalam Pandangan Orientalisme

Orientalisme merupakan suatu pemahaman, cara pandang, deskripsi atau bahkan identifikasi Barat tentang Dunia Timur dengan segenap kompleksitas budaya, agama, bahasa, ekonomi maupun politiknya. Edward W. Said dalam karya terkenalnya *Orientalisme*, setidaknya telah mendefinisikan orientalisme ke dalam beberapa pengertian yakni, pertama, orientalisme merupakan suatu gaya berpikir

yang berdasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis antara The Orient (Timur) dan hampir selalu The Occident (Barat). Kedua, orientalisme merupakan suatu lembaga (sarana) untuk berurusan dengan Timur, dengan membuat pernyataan tentangnya, mewewenangkan pandangan tentangnya, mendeskripsikannya dengan mengajarnya sehingga orientalisme tidak lebih dari gaya Barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguasai Timur. Ketiga, orientalisme merupakan keseluruhan jaringan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan setiap kesempatan untuk memperbincangkan eksistensi Timur.

Sebagai sebuah sistem keilmuan, orientalisme pertama kali muncul pada abad ke-14 awal yang dibawa oleh Konsul Gereja Vienna pada sejumlah universitas untuk mempromosikan pemahaman bahasa dan kebudayaan Timur. Sumber pendorong utama pada orientalisme berasal dari perdagangan, persaingan antar agama dan konflik militer. Sebab itu pengetahuan tentang Timur tidak bisa dipisahkan dari sejarah ekspansi Eropa ke Timur Tengah dan Asia. Penemuan rute Tanjung Harapan ke Asia oleh Vasco da Gama tahun 1489 amat memperluas pendirian orientalisme, tapi hal itu tidak sampai pada abad 18 dan 19, sehingga kajian-kajian terperinci mengenai masalah-masalah ketimuran diterbitkan di Eropa.

John L. Esposito melihat bahwa betapa Barat telah menganggap Islam sebagai ancaman. Fundamentalisme dan terorisme Islam ibarat kereta yang berkeinginan untuk mendeskreditkan dan menjatuhkan musuh-musuh mereka. Orang Barat dalam pandangan John L. Esposito telah banyak melakukan kesalahan dalam melihat kebangkitan Islam. Sementara itu bagi Esposito, kebangkitan Islam kontemporer dalam politik Muslim jauh lebih penting dan pengaruhnya lebih menyebar terhadap

masyarakat Muslim dan bernuansa positif sebagai fenomena politik maupun sosial.

Ini adalah sebagian pandangan John L. Esposito, dan sebagaimana akan dipaparkan nantinya, akan tampak di sana bahwa pengkaji Islam yang satu ini memang memiliki penghargaan yang sedikit berbeda dari para pengkaji Barat sebelumnya. Bisa jadi kehadiran John L. Esposito merupakan salah satu bentuk kegerahan para sarjana Barat atas persepsi-persepsi Barat, atau mungkin juga karena beribu-ribu stereotip yang terus-menerus diklaimkan atas Islam. Seluruhnya ini tentu akan memancing para sarjana Barat untuk meneliti dengan sebenarnya, atau dengan kata lain untuk membuktikan apa-apa yang senantiasa mereka dengar selama ini tentang Islam. Esposito kiranya telah memberikan suasana yang lain di tengah-tengah maraknya persepsi lama Barat atas Islam. Setidak-tidaknya untuk merubah persepsi miring Barat selama ini tentang Islam.

Sementara itu Karen Armstrong seorang pengkaji Islam yang tak kalah populer sebagai pengkaji Islam masih tergolong baru. Akan tetapi produktifitasnya yang tinggi dalam menghasilkan kajian tentang agama-agama khususnya Islam membuatnya banyak memberikan opini dan penilaian mengenai Islam. Mengamati sekilas karya-karya Armstrong akan terlihat di sana bahwa dia merupakan pengkaji yang memilih bersikap obyektif dalam memberikan pandangan dan penilaian mengenai Islam.

Ada momen-momen dimana ia mengkritik kaum Muslim, namun demikian dia juga sering menggambarkan beberapa kesalahan orang Barat dalam menilai Islam, serta pelurusan dari Armstrong sendiri mengenai kesalahan-kesalahan tersebut. Kecenderungan lain dari sebagian pengkaji Islam kontemporer di atas telah memberikan corak dan warna yang lain tentang persepsi mengenai Islam di tengah-tengah masyarakat dunia. Oleh karena itu cukup menarik

manakala kecenderungan tersebut ditelusuri secara lebih radikal khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa terjadi kecenderungan semacam itu? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecenderungan tersebut dan sebagainya?.

Moderasi Beragama Sebagai Penyesuaian

Sikap Islamophobia atau Anti-Islam di Eropa terlihat sangat jelas pada Partai British National Party (BNP) di Inggris, yang menggunakan isu untuk kampanye politik. Di Belanda Greet Wilders juga menggunakan cara-cara seperti ini dalam pemilihan anggota Parlemen bagi partainya, Party For Freedom (PVV). Begitu pula di Amerika Serikat, Islamophobia telah berkembang selama bertahun-tahun dan semakin meningkat pesat sejak terjadi peristiwa penyerangan World Trade Center (WTC) 11 September 2001. Peristiwa tersebut membawa angin besar anti Islam di dunia barat. Hal ini semakin memanas oleh pernyataan tokoh Kristen Amerika, seperti Pat Robertson dan Jerry Falwell, yang mempertanyakan apakah Islam sebagai sebuah agama, setelah itu memberikan cap (label) Nabi Muhammad perampok dan teroris. Bahkan, Senator Saxby Chambliss agar polisi menangkap setiap Muslim yang berusaha keluar dari Negara-negara Federal.

Sebagai suatu sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya yaitu egalitarianisme, partisipasi, dan keadilan; demokrasi tentu saja menjadi sistem politik yang dianut oleh Nurcholish. Secara filosofis Nurcholish mengatakan:

Salah satu inti dari nilai kemanusiaan ialah perkembangan demokrasi adalah kemanusiaan. Karena itu sebaiknya kita tidak memahami demokrasi sebagai sesuatu yang statis,...demokrasi lebih baik kita pahami sebagai sesuatu yang dinamis, yang menyatu pada masyarakat dalam bentuk proses-proses progresif mengikuti suatu garis kontinum.

Kita akan mengatakan suatu masyarakat tidak demokratis jika tidak ada proses demokratisasi Dan proses itu bisa diukur atau diketahui dalam nilai-nilai yang merupakan implikasi masyarakat demokratis seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, tertib dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata, dan seterusnya.”

Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh beberapa Muslim, oleh pers Barat dibuat berlebihan, sehingga menjadi wacana internasional dan menciptakan opini publik negatif bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang negative image banyak ditujukan kepada Islam sehingga umat Islam telah terpinggirkan sebagai orang yang perlu dicurigai. Kondisi seperti itu terjadi karena orang Barat mampu menguasai pers yang digunakan sebagai alat yang kuat untuk memproyeksikan budaya dominan peradaban global.

Label Islam menyebutkan gerakan fundamentalis sangat menarik untuk pers Barat dari label Tamil di Sri Lanka, militan Hindu di India, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan sayap kanan psikoterapi sekte Yahudi, komunis-Marxis yang tidak jarang menggunakan kekerasan sebagai solusi pemecahan masalah Realitas historis-sosiologis ini adalah bukti bagaimana Barat menggunakan standar ganda dan tidak adil untuk Islam.

Masyarakat Barat memiliki klaim atas peradaban Islam sedangkan peradaban Islam dibentuk identitas. Dengan demikian tidak berarti membenarkan perilaku radikalisme Muslim dilakukan untuk alasan apa pun perilaku kekerasan adalah pelanggaran norma agama serta pelecehan terhadap manusia.

Islam moderat lebih dikenal sebagai bentuk lawan dari Islam radikal atau dikenal dengan Islam garis tengah. Alasan utama dilahirkannya istilah Islam moderat oleh para

pendirinya adalah karena adanya Islam garis keras tersebut. Maka Islam moderat ingin menjadi solusi atas hal-hal yang dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk dari garis keras tersebut. Istilah moderat (*moderate*) berasal dari bahasa Latin *moderare* yang artinya mengurangi atau mengontrol. Kamus *The American Heritage Dictionary of the English Language* mendefinisikan *moderate* sebagai: *not excessive or extreme* (tidak berlebihan dalam hal tertentu). Kesimpulan awal dari makna etimologi ini bahwa moderat mengandung makna obyektif dan tidak ekstrim, sehingga definisi akurat Islam Moderat adalah Nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan.

Gerakan Politik Islam Kontemporer

William E. Shepard membagi Islam ke dalam lima tipologi gerakan Islam, yaitu: sekularisme, modernisme Islam, Islam radikal, tradisionalisme, dan neo-tradisionalisme. Pandangan lain tentang tipologi gerakan Islam, dapat digolongkan menjadi: modernisme Islam, tradisionalisme Islam, fundamentalisme Islam, neo-modernisme Islam, neo-fundamentalisme Islam sampai kepada yang belakangan ramai diperbincangkan orang di tanah air, yakni post tradisionalisme Islam. Ada empat tipologi kelompok gerakan Islam yang dielaborasi Setara Institute. Pertama, kelompok Islam moderat yang memiliki tiga ciri yaitu: (1) tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam; (2) akomodatif terhadap konsep negara-bangsa modern; (3) organisasi bersifat terbuka (contohnya NU dan Muhammadiyah). Kedua, kelompok Islam radikal transnasional yang memiliki empat ciri yaitu: (1) berjuang melakukan perubahan sistem sosial dan politik; (2) tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam; (3) perjuangannya bersifat ideologis; (4)

organisasi bersifat terbuka dan lintas batas negara (contohnya HTI).

Kendati pemikiran politik Islam kontemporer sering dibedakan dengan pemikiran Islam klasik, namun keduanya merupakan suatu kontinuitas atau kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian pula pemikiran politik Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah pemikiran Islam, bahkan dari sejarah Islam itu sendiri.

Dalam hal ini Antony Black memberikan catatan sebagai berikut: “Kita tidak akan bisa memahami sejarah Islam politik tanpa memahami sejarah Islam itu sendiri, karena gerakan sosial dan politik Islam kontemporer, paling tidak sebagiannya, didasarkan atas berbagai gagasan dan model yang terbentuk pada masa-masa sebelumnya.” Kontinuitas atau persambungan dan diskontinuitas atau perubahan merupakan dinamika yang melekat dalam sejarah pemikiran apapun, termasuk dalam pemikiran politik Islam dari klasik hingga kontemporer. Perkembangan dan kemajuan berpikir atau pemikiran justru merupakan akumulasi dari proses sejarah yang dinamik itu laksana terbentuknya sebuah bangunan dari tumpukan satu batu ke batu lainnya yang membentuk keseluruhan.

Pemikiran era klasik dan kontemporer baik tokoh maupun mazhab yang berkembang pada zamannya saling berdialog satu sama lain, sehingga terjadi dinamika maupun dialektika, terdapat persambungan maupun perubahan, bahkan terjadi reproduksi atau daur ulang pemikiran. Karena itu pemikiran-pemikiran tersebut dapat dijadikan khazanah atau mozaik yang memerlukan pengayaan sebagaimana berlaku dalam tradisi Muslim selama ini, yakni *al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*, artinya memelihara nilai-nilai (pemikiran) lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai (pemikiran) baru yang lebih baik.

Robert W. Hefner, dengan merujuk pada proposisi yang dikemukakan oleh Alexis De Tocqueville, menyatakan agama bisa memegang peranan sentral dalam proses demokratisasi, bahwa agama tidaklah harus dipisahkan dari politik. Bahkan yang diperlukan bukanlah *separation of religion and state*, tetapi suatu penolakan terhadap sub-ordinasi agama kepada politik untuk kepentingan penguasa. Dalam proses demokratisasi, sumbangsih agama paling efektif adalah ketika organisasi agama bergerak dari luar negara di wilayah yang disebut *civil society*. Peristiwa seperti ini, kelompok agamis menjadi bagian dari kontrol terhadap negara daripada menjadi bagian dari *power elite*, organisasi agama dalam masyarakat sipil membatasi kekuasaan negara dan memperkuat *balance of power* yang diperlukan untuk sebuah masyarakat sipil dalam lingkup demokrasi.

Tesis utama dari pandangan Hefner bahwa semua masyarakat kontemporer mengalami dilema struktural serupa bila dan ketika mereka menetapkan untuk melakukan demokratisasi. Pada sisi yang sama, paradoks utama globalisasi yang disebut demokratisasi ini sumber daya kultural yang digunakan untuk mencapai demokrasi beragama dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Tidak ada jalan tunggal menuju demokratisasi, paling tidak yang spesifik dan diciptakan untuk semua zaman di Barat. Demokratisasi baru berhasil yang diarahkan pada tujuan yang serupa jika ia secara aman didasarkan pada organisasi lokal dan makna-makna kultural. Bahkan di Barat pun, jalan ke demokrasi begitu beragama.

Adapun solusi dan analisis dari kaum cendekiawan Muslim, selanjutnya diikuti dengan berbagai gerakan. Inilah yang dikenal sebagai gerakan kebangkitan Islam. Gerakan Kebangkitan Islam pada dasarnya adalah suatu gerakan yang dilandasi oleh suatu pandangan kaum Muslim bahwa Islam akan menjadi penting kembali. Masa lalu Islam

yang bersinar dianggap mempengaruhi pemikiran kaum Muslim masa kini sehingga pada masa mendatang Islam akan menjadi alternatif. Gerakan kebangkitan Islam ini terus berlangsung dan bergema hingga abad ke-20.

Fenomena solusi dari kalangan muslim lainnya dalam bentuk perjuangan Islam dengan pola ormas pada awalnya digunakan oleh kelompok yang disebut kaum pembaharu, kaum yang ingin melakukan pengoreksian kembali pemahaman umat Islam terhadap Islam. Kelompok ini dengan tegas menggunakan pola-pola modern baik dari segi struktur, pola gerak, dasar ikatan, maupun kepemimpinannya. Selanjutnya, kaum yang dikenal sebagai tradisional pun menyesuaikan diri dan melakukan perubahan dengan membentuk juga organisasi-organisasi modern. Namun model yang dipakai cenderung ambivalen karena di satu sisi mereka tetap bertahan dengan pola tradisionalnya (*komunal-paternalistik*), dan di sisi lain mengadopsi struktur modern.

Politik Islam Dalam Arus Globalisasi

Perhatian terhadap Islam sebagai kekuatan penting dalam politik global akhir-akhir ini semakin meningkat. Masalahnya, perhatian tersebut seringkali dikacaukan dengan ketakutan terhadap terorisme dan ekstrimisme, terutama pasca tragedi 11 September 2001. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan, khususnya di Barat, Islam dianggap sebagai ancaman. Bisa dikatakan bahwa ketakutan tersebut adalah buah dari prasangka politik dan intelektual terhadap Islam yang memang telah hidup lama sejak zaman para orientalis klasik hingga para jurnalis kontemporer. Keberagaman wajah Islam direduksi hanya ke dalam sosok Osama Bin Ladin. Selain itu, prasangka tersebut juga muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam memahami politik global itu sendiri. Dunia berubah begitu cepat.

Globalisasi merambah dalam hampir semua aspek kehidupan, sehingga batas-batas tradisional antara Barat dan Timur, misalnya ditantang sedemikian rupa. Di sisi lain, arus migrasi telah mengantarkan jutaan orang, termasuk Muslim, untuk melintasi garis teritorial negara nasional, membentuk komunitas transnasional dan diaspora, sehingga afiliasi identitas pada unit geografi tertentu secara permanen tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam konteks politik global tersebut, Islam dan kaum Muslim bukan entitas yang sama sekali terisolasi dari konteks di luarnya. Mereka adalah bagian dari warga negara tertentu pada satu sisi dan bagian dari komunitas internasional pada sisi yang lain. Dengan pencapaian teknologi informasi yang mengagumkan, berbagai individu dan komunitas secara virtual terkoneksi satu sama lain dalam intensi yang hampir menyerupai jenis komunikasi tradisional sebelumnya.

Melihat situasi ini, cara paling baik untuk memahami Islam dan kaum Muslim adalah menempatkannya dalam pembicaraan tentang modernitas. Akan tetapi, berpijak pada titik ini dapat dilihat bahwa modernitas sejatinya selalu berbentuk jamak, sehingga kata “modernitas” sebenarnya berarti “modernitas- modernitas” (modernities). Dengan kata lain, tidak ada jalan tunggal menuju modernitas. Sampai tingkat tertentu, masing-masing entitas mempunyai pengalaman sejarah yang khas, sehingga referensi dan cara mereka menanggapi modernitas pun sudah pasti berbeda satu dengan yang lain.

Pembaharuan Islam pada periode modern sebagian besar bermuara pada pertanyaan tentang hubungan antara agama dan politik atau Islam dan negara. Pertanyaan sentral ini sesungguhnya ironis karena pada saat yang sama negeri- negeri Muslim justru sedang berada di bawah cengkaman bangsa-bangsa asing. Kredo bahwa Islam adalah agama dan negara semakin kuat pada periode ini. Kredo

ini dibahasakan secara lebih populer dalam jargon ‘Islam kaffah’. Intinya Islam diharapkan mewarnai semua bidang kehidupan, tidak hanya spiritualitas, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik.

Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh al-Bana , kemudian dideologisasikan lebih lanjut oleh Sayyid Quthb, tak pelak lagi adalah gerakan yang sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan ide ini . Tulisan ini memandang bahwa periode Islam kontemporer dimulai sejak paruh kedua abad ke-20, yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai sekarang. Periode Islam kontemporer ini disinyalir oleh dua peristiwa utama. Pertama, dekolonisasi negara-negara Muslim dari cengkaman kolonialisme Eropa. Kedua, gelombang migrasi Muslim ke negara-negara Barat. Dua peristiwa itu telah mengubah peta geografi dunia Muslim. Apa yang disebut dunia Muslim tidak lagi identik dengan dunia Arab, tetapi meliputi berbagai negara nasional yang tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, merentang dari mulai Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Selain itu, sejak itu pula kaum Muslim telah menjadi bagian dari demografi negara-negara Barat.

Akan tetapi, pada dekade-dekade awal pasca Perang Dunia II, Islam belum menjadi subjek penting dalam politik global. Isu utama pada masa itu adalah Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan jargon liberalismenya dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan jargon komunismenya. Pertarungan ideologi antara kedua blok tersebut menjadi latar belakang hampir semua peristiwa politik ekonomi internasional. Dalam hal ini, posisi negara-negara Non-Blok, di mana Indonesia dan beberapa negara Muslim lain termasuk di dalamnya, cukup terjepit dan dalam kenyataannya hanya menjadi objek rebutan pengaruh negara-negara adidaya.

Politik Islam Eropa

Islam di Eropa memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai pada awal abad ke-7 M, Islam menaklukkan Andalusia yang dipimpin oleh Thariq bin Ziad. Hingga berakhir pada abad ke-14 saat diserang oleh pasukan Salib. Selanjutnya sejarah Islam di Eropa muncul kembali pada zaman modern ini. Namun pembahasan tentang sejarah masuknya Islam di Eropa tersebut menjadi penting sebagai pengantar dan titik tolak Islam di Eropa. Kemudian penulis mengambil Eropa sebagai objek kajiannya, karena Barat sendiri terbagi menjadi dua yaitu Amerika dan Eropa. Islam dan politik di Eropa yaitu di mana umat Islam di negara-negara Eropa melakukan kegiatan politik secara rasional dan realistis untuk memperjuangkan hak-haknya. Entah itu melalui organisasi, LSM, kelompok diskusi, dewan masjid dan bahkan organisasi yang memang didirikan untuk orientasi politik.

Berbeda keadaan secara drastis di zaman modern ini, di mana mobilitas umat beragama berkembang pesat tanpa mengenal batas wilayah negara bangsa. Umat Islam menyebar signifikan di berbagai penjuru dunia, dalam hal ini Eropa, yaitu Inggris dan Prancis, sebagai imigran. Warga Islam memiliki sejarah dan proses politik yang panjang daripada negara-negara lain di belahan Eropa lainnya. Di Inggris, warga muslim walaupun sebagai minoritas namun tetap mendapatkan hak-hak politiknya baik itu memilih maupun di pilih. Namun kewarganegaraannya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, status hukum yang berbeda yang memberikan hak lebih bagi kaum pribumi Inggris daripada kelompok lain. Kedua, pemantauan statistik yang didasarkan pada ras dan etnis yang menghasilkan kebijakan “diskriminasi positif” yang memihak kelompok minoritas.

Sedangkan di Prancis, tradisi politiknya yang aktif dalam penanganan setiap identitas regional, etnis, atau keagamaan yang berpotensi mengancam hubungan antara

individu dan negara. Negara berusaha merangkum ekspresi keagamaan dalam kerangka hukum yang mengontrol ibadah dan menolak setiap perlakuan hukum yang berbeda. Kewarganegaraan di Prancis diperoleh warga negara lain yang sudah tinggal dalam kurun waktu tertentu yang cukup lama. Selain itu mensyaratkan akulturasi, penguasaan bahasa Prancis, dan menerima konstitusi. Demikian kasus di Prancis sangat berbeda dengan Inggris dalam masalah kewarganegaraan yang akan berpengaruh penting terhadap pemenuhan hak-hak politik warga muslim di kedua negara tersebut.

Hingga hari ini, perjuangan masyarakat muslim di Eropa masih harus melalui perjalanan yang panjang bahkan bisa dibayangkan curam. Pengakuan secara legal-formal sebagai imigran yang diakui kewarganegaraannya pun tidak cukup untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat muslim di Eropa. Permasalahan yang muncul di abad ini lebih pada sikap masyarakat lokal dan beberapa pejabat resmi yang anti-terhadap Islam sebagai sebuah sistem keyakinan yang tersulut karena menganggap terorisme yang semakin menjadi-jadi di abad ke 21. Gerakan Islamophobia pun muncul secara terang-terangan di berbagai negara di Eropa, bahkan semakin hari semakin meluas. Masyarakat muslim seolah menjadi tertekan jauh dari kata bebas merdeka. Nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan yang lahir di Eropa dan menjadi slogan bangsa barat, seolah tidak berlaku bagi masyarakat muslim di sana. Padahal dunia semakin maju dan modern, dan semangat kesetaraan harusnya sudah tidak diperdebatkan lagi. Mungkin pada kesempatan lain akan dibahas secara lebih gamblang dan jelas terkait permasalahan muslim di Barat pada abad 21 dewasa ini.

Politik Islam dan Liberal

Robert W. Hefner, dengan merujuk pada proposisi yang dikemukakan oleh Alexis De Tocqueville, agama bisa memegang peranan sentral dalam proses demokratisasi. Bahwa agama tidaklah harus dipisahkan dari politik. Bahkan yang diperlukan bukanlah separation of religion and state, tetapi suatu penolakan terhadap subordinasi agama kepada politik untuk kepentingan penguasa. Sumbangan agama dalam proses demokratisasi paling efektif adalah ketika organisasi agama bergerak dari luar negara di wilayah yang disebut civil society. Dalam kondisi seperti ini, pasukan agamis menjadi bagian dari kontrol terhadap negara daripada menjadi bagian dari power elit, organisasi agama dalam masyarakat sipil membatasi kekuasaan negara dan memperkuat balance of power yang diperlukan untuk sebuah masyarakat sipil dalam kerangka demokrasi.

Keagamaan Islam yang universal tidak ada pilihan lagi harus bekerja pada ranah partikular. Negara-bangsa modern secara normatif selalu mengandaikan adanya ikatan kewarganegaraan yang terbatas. Hubungan antara warga negara atau individu dan negara diikat oleh suatu komitmen yang sampai tingkat tertentu bersifat sekuler. Negara-bangsa modern mentransendensikan warganya dari bendungan identitas- identitas etnik, agama, dan jenis-jenis komunalisme lainnya ke dalam wadah besar bernama bangsa. Proses transendensi tersebut tidak mudah, bahkan di banyak tempat terjadi kekerasan yang mengesankan. Salah satu penyebabnya adalah watak dari negara-bangsa modern itu sendiri yang dalam perspektif Weber diberi legitimasi untuk menggunakan kekerasan demi keutuhan teritorialnya layaknya hewan yang sedang mempertahankan wilayahnya.

Pada sisi yang lain, dapat disadari bahwa tidaklah setiap jenis organisasi keagamaan sama akrabnya dengan demokrasi yang ada. Tatanan keagamaan yang mendukung

kemajuan demokrasi adalah tatanan yang memperkuat dan melegitimasi pluralisme dan sama pentingnya dengan (serta sesuai dengan perintah Al-Qur'an bahwa tidak ada paksaan dalam beragama), melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan demi menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam urusan agama.

Sebagaimana pendapat Max Weber, Negara adalah sebuah lembaga yang memonopoli kekerasan di dalam masyarakat. Efeknya adalah bahwa satu-satunya jalan untuk menjamin bahwa tanpa kekerasan di dalam urusan keagamaan adalah dengan membangun organisasi agama yang kuat yang lebih berfungsi sebagai kontrol, ketimbang sebagai penopang kekuasaan monopoli negara. Maksud dengan hal ini ialah bahwa orang-orang mukmin mesti mendasarkan tindakan dan organisasi mereka terutama pada masyarakat sipil.

Melakukan tindakan, perdebatan dan contoh yang shaleh mereka bisa berfungsi sebagai jantung dan pikiran warga negara dan menjadi pengimbang monopoli negara terhadap kekuasaan. Disimpulkan bahwa agama dapat memperkuat demokrasi ketika para pemimpin agama menjaga jarak dan berhati-hati, dengan tidak pernah membiarkan diri mereka atau ide-ide mereka disub-ordinasikan terhadap watak para penguasa atau program partai tersebut.

Poin dalam perspektif Hefner politik sipil Islam bukanlah sesuatu yang sama dengan "pemisahan agama dan negara" liberalisme Barat. Meskipun oleh beberapa ahli masing-masing punya pandangan sendiri, David Held misalnya mengatakan bahwa secara historis Liberalisme sudah mengalami pergeseran makna. Liberalisme menurut Held adalah membebaskan civil society, baik secara personal, keluarga, maupun kehidupan ekonomi, dari campur tangan Negara dan sekaligus membatasi kewenangannya. Pada sisi yang lain juga Hefner mengatakan bahwa Liberalisme Barat menekankan posisi agama

tidak diijinkan masuk ke wilayah publik dan sebaliknya agama harus tidak lebih dari keyakinan personal.

Baik dalam Islam maupun Kristen, sejarah telah menunjukkan bahwa demokratisasi dan modernitas tidak memerlukan privatisasi seperti itu. Sebaliknya sebagaimana di Amerika Serikat dan di Indonesia, demokrasi bisa diperkuat oleh tindakan orang-orang beriman yang mencoba mewujudkan janji-janji mengenai harkat dan keadilan dari agama mereka. Pada saat yang sama peran publik agama jangan sampai mensub-ordinasi program-program politik. Muslim di Indonesia telah membuat sumbangan yang tak ternilai harganya bagi politik global dengan menunjukkan bahwa demokrasi beresonansi dengan nilai-nilai Islam yang terdalam. Perjuangan mereka telah menunjukkan bahwa pandangan Huntington dan orang lain yang seperti dia yang melihat bahwa antara Islam dan demokrasi itu bertentangan adalah kesalahan.

Perspektifnya Hefner dengan meminjam proposisi yang dikemukakan oleh Dale Eickelmen dan James Piscatori, menyatakan bahwa ciri-ciri penting politik Muslim di seluruh dunia sekarang adalah perebutan penafsiran terhadap simbol-simbol dan penguasaan terhadap lembaga-lembaga yang melahirkan dan mempertahankannya baik formal maupun informal. Dalam hal ini menunjukan bahwa ciri-ciri persaingan yang menonjol adalah apa yang disebut sebagai "objektivikasi" pengetahuan keagamaan dan bersamaan dengan itu terjadi pluralisme wewenang keagamaan. Patut juga dipahami saat ini pengetahuan dan praktik Islam merupakan objek kepentingan bagi sejumlah orang yang semakin bertambah. Dinamika pengetahuan Islam tidak lagi dimonopoli oleh sejumlah kecil ulama, akan tetapi sudah tersebar diberbagai kalangan.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas terlihat bagaimana Islam dan modernitas terlibat dalam peristiwa perjumpaan tertentu, dari mulai kolonialisme hingga situasi politik global pasca peristiwa 11 September 2001. Hasil dari perjumpaan tersebut sangat bervariasi, tergantung pada kompleksitas Muslim sendiri yang memang telah terdeteritorialisasi sedemikian rupa. Dapat disebut dunia Muslim secara konseptual tidak bisa lagi hanya merujuk pada Timur Tengah atau Arab dari mana Islam untuk pertama kalinya lahir, tetapi pada dunia itu sendiri. Keberadaan Muslim merentang luas di negara-negara nasional dari mulai Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Selain itu, banyak kaum Muslim yang sekarang tinggal di Eropa, menjadi bagian integral dari masyarakat Barat itu sendiri. Situasi seperti ini tentu saja merupakan tantangan bagi para pemikir Muslim maupun para pengamat yang berminat dengan isu-isu keislaman untuk memikirkan model pembaharuan Islam yang baru. Dilihat pada masa sebelumnya, asumsi yang mendasari wacana pembaharuan Islam adalah dikotomi antara Islam dan Barat dengan latar belakang kolonialisme dan trauma pascakolonial pada masa dekolonisasi awal yang sangat kuat. Sekarang nilai asumsi lama itu sebagiannya kurang relevan lagi. Model pembaharuan Islam kontemporer sudah seharusnya mempertimbangkan adanya fakta mengenai interkoneksi global yang semakin luas jangkauannya pada satu sisi, tetapi juga meningkatnya sentimen anti-Islam dan anti-orang asing di negara-negara Barat sendiri pada sisi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terjemahan Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi, 2001)

- Esposito, John L. *The Islamic Threat, Myth or Reality*, (New York: Oxford University Press, 1992)
- Dagi, Ihsan D. "Islamic Political Identity in Turkey : Rethinking the West an Westernization Islamic Political Identity in Turkey : Rethinking the West and Westernization," 2002.
- Dagi, Ihsan D. "Transformation of Islamic Political Identity in Turkey :” 6, no. 1 (2005). *Europe, Western. "Article New Social Movements and Political Opportunities in Western Europe"* 22, no. 2 (n.d.): 219–44.
- Faiqah, Nurul, Toni Pransiska, U I N Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "RADIKALISME ISLAM VS MODERASI ISLAM : (2018). *Identity, Founded, Constructed Identity, and Political Islam. "The Process of Formation of " Found " Identity and " Constructed " Identity in Salafism and Politic,"* 2022, 134.
- Ihsan, A Bakir. "Islamic Political Parties in the Post-Truth Era," 2020, 10. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2019.2293532>.
- Isnaeniyah, Erni. "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ISLAM INDONESIA DALAM TRADISI ‘ NU ’” 1, no. Maret (2017): 23.
- Jafar, Usman. "KEKUASAAN DALAM TRADISI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)" 6, no. 2 (2017): 345–57.
- Karim, Syahrir. "Islam Ideologis Dan Gerakan Politik Islam Kontemporer" 04, no. 2 (2016): 141.
- Kaunian, Muflih Fahmi. "Islam Politik Di Eropa (Dinamika Pengakuan Masyarakat Islam Di Inggris & Prancis Abad 20)" 3, no. 1 (2020): 42.
- March, Andrew F. "Islamic Foundations for a Social Contract in Non-Muslim Liberal Democracies" 101, no. 2 (2007): 235–52.
- Muslikhati, Siti. "Isu Terorisme Dalam Jurusan Hubungan Internasional Perspektif Islam," 2002, 24.
- Nashir, Haedar. "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer Pendahuluan," n.d., 1–20.
- Nurtina, Sitti. "THE DYNAMICS OF APPLYING PAN- ISLAMISM AS A NEW POLITIC CONCEPT" 3, no. 1 (n.d.): 121. *Orientalisme, Mata, and Orientalisme Kontemporer. "Islam Di Mata Orientalisme Klasik Dan Orientalisme Kontemporer"* XV, no. 1 (2016): 3–4.
- Petito, Fabio, Luca Mavelli, and Luca Mavelli. "The Postsecular in International Relations : An Overview Related Papers," 2011, 11.
- Politik, Islam, Politik Global, Jurnal Politik, and Profetik Volume. "Islam Politik Dalam Politik Global Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013" 2 (2013): 4.
- Rahman, Mohammad Taufiq, Asep Saeful Mimbar, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Jati, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Jati. "Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial Dan Budaya KONSEP POLITIK ISLAM KULTURAL PERSPEKTIF NURCHOLISH" 3 (2018): 393.
- Situmorang, Jubair. "Islamic Political Thought in Indonesia in The Post-Truth Era," 2020, 202. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302605>.
- Vol, Jurnal Keislaman. "ISLAM DI SPANYOL : JEMBATAN PERADABAN ISLAM KE BENUA EROPA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RENAISSANCE." *Keislaman*. 7, no. 2 (2021): 190–219.